

ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Anak Agung Ngurah Jaya Kusuma¹

I Gusti Bagus Indrajaya²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Keuangan inklusif (*financial inclusion*) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 dengan lokasi penelitian di 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Analisis jalur dan uji sobel digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung melalui variabel *intervening* antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Namun, inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan industri perbankan di Provinsi Bali yang masih belum merata dan terkonsentrasi di Bali Selatan. Inklusi keuangan berpengaruh tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat melalui tingkat kemiskinan.

Kata kunci: inklusi keuangan, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan masyarakat

ABSTRACT

Financial inclusion (financial inclusion) as all efforts aimed at eliminating all forms of price and non-price barriers to public access in utilizing financial services. This study aims to analyze the effect of financial inclusion on the level of poverty and income inequality in the District / City of Bali Province. This study uses secondary data from 2014 to 2018 with research sites in 9 city districts in Bali Province. Path analysis and sobel test are used to determine the direct effect and indirect effect through intervening variables between independent variables in influencing the dependent variable. The analysis showed that financial inclusion had a negative and significant effect on poverty levels. The level of poverty has a positive and significant effect on income inequality. However, financial inclusion has no significant effect on income inequality. This is due to the development of the banking industry in the province of Bali which is still uneven and concentrated in South Bali. Financial inclusion has an indirect effect on community income inequality through poverty levels.

keyword: financial inclusion, level of poverty, income inequality

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDG's diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad dalam Artana Yasa, 2015). Terdapat 17 tujuan global SDG's beberapa hal diantaranya yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua, pengentasan kemiskinan, termasuk juga mengurangi kesenjangan di masyarakat.

Salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang inklusif dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Hartati dan Azwar, 2017). Inklusi keuangan adalah instrumen perbankan yang memegang peranan penting dalam stabilitas sistem keuangan melalui akses dan layanan keuangan (Rusdianasari, 2018). Indonesia menjadikan keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan yang merata, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, 2010 dalam Hartati dan Azwar, 2017). Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 September 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Perpres SNKI ini dikeluarkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan menjadi pedoman langkah-langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Hartati dan Azwar, 2017).

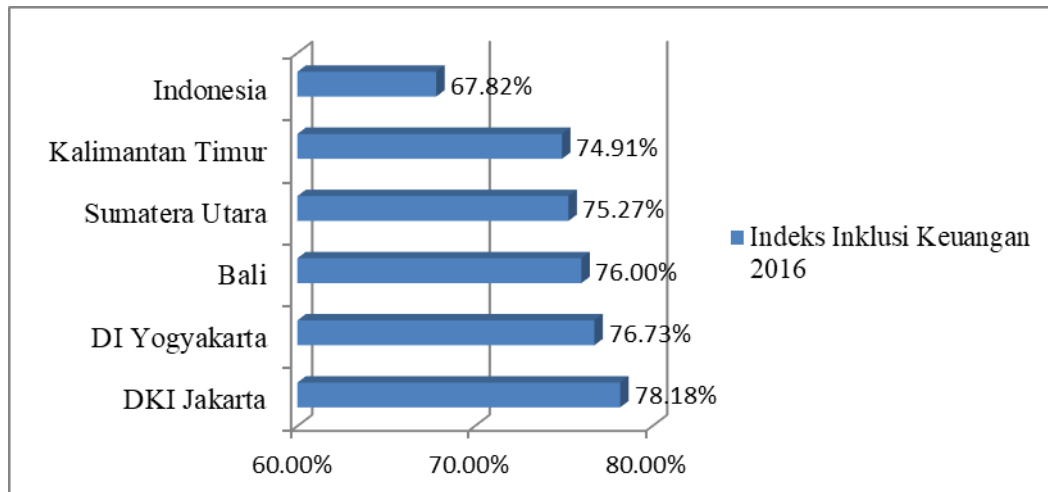
Bank Indonesia (2014) mendefinisikan keuangan inklusif (financial inclusion) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Akses menuju layanan perbankan yang tidak memadai mengakibatkan masyarakat tidak mengenal produk perbankan, masyarakat ini dapat dikategorikan sebagai unbanked people. Akses tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan simpan-pinjam. Inilah yang kemudian mendorong suburnya pertumbuhan lembaga keuangan non formal atau biasa disebut tengkulakatau rentenir.

Lembaga keuangan dalam hal ini khususnya perbankan, memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya. Masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan perbankan tentu akan mendorong masyarakat untuk membeli salah satu produknya, baik dalam bentuk asuransi, deposito, tabungan, dan sebagainya. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana yang pada awalnya disimpan di dalam lemari, dapat menyimpan kelebihan dananya tersebut di bank. Demikian pula bagi masyarakat yang kekurangan dana dapat meminjam di bank dengan bunga yang lebih rendah dibanding dengan rentenir. Oleh karena itu sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.

Secara umum berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia sudah Otoritas mencapai 67,82 persen. Tingkat inklusi keuangan tersebut meningkat 8,08 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sekitar 59,74 persen. Kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal di Indonesia berdasarkan survei Global Findex 2017 sebesar 48,9 persen atau meningkat sebesar 12,8

persen dari tahun 2014. Peningkatan kepemilikan rekening di Indonesia adalah tertinggi diantara negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik (Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 2017). Namun, Indonesia masih memiliki masalah inklusi keuangan yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Filipina dan Kenya, dimana Indonesia belum memiliki rekening bank terkonsentrasi di daerah pedesaan di seluruh nusantara dan fasilitas untuk menjangkau cabang-cabang bank masih terbatas. Diperkirakan 100 juta orang Indonesia tidak memiliki akses ke layanan keuangan (Stapleton, 2013).

Tidak adanya akses ke layanan keuangan formal membuat kesadaran masyarakat untuk menabung menjadi rendah sehingga membuat lembaga keuangan formal kurang efektif dalam menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Hal tersebut menyebabkan Indonesia masih mengandalkan arus modal asing masuk (capital inflow) dalam pendanaan kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menabung, akses layanan keuangan formal yang rendah juga mendorong pertumbuhan kredit dari lembaga keuangan informal (rentenir) dengan suku bunga yang tinggi (Retno Dewi, 2017). Bunga tinggi tidak mendorong keberlanjutan dari inklusi keuangan. Bunga tinggi akan membuat masyarakat yang unbanked menjadi lebih terbebani dan membuat pinjaman macet. Akibatnya, akses ke layanan keuangan semakin sempit. Bunga tinggi juga tidak sesuai dengan semangat pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan. Pemerintah selalu mendorong bank menurunkan bunga kredit agar semakin banyak masyarakat yang mau meminjam uang pada lembaga keuangan (CNBC Indonesia, 2018).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2016

Gambar 1 Lima Provinsi dengan Indeks Inklusi Keuangan Tertinggi Tahun 2016

Pada Gambar 1 memperlihatkan 5 (lima) provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi pada tahun 2016, dimana kelima provinsi tersebut bahkan memiliki indeks inklusi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks inklusi keuangan secara nasional. Provinsi Bali mampu menduduki peringkat lima besar dalam skala nasional, dengan nilai indeks inklusi keuangan sebesar 76,00 persen. Menurut Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional Bali Nasirwan Ilyas, fenomena tingginya nilai indeks inklusi keuangan di Bali dipicu oleh keberadaan lembaga perkreditan desa (LPD) (Kristianto, 2016). Keunikan perilaku masyarakat Bali yang berkaitan dengan bidang keuangan ditunjukkan oleh tetap bertahannya lembaga keuangan berbasis adat, yaitu LPD dalam melayani jasa keuangan di Bali. LPD dimiliki dan dikelola oleh desa adat di Bali yang disebut juga dengan desa pakraman. Jumlah LPD di Bali mencapai 1.422 unit yang tersebar di 1.482 desa pakraman dengan total aset mencapai lebih dari Rp 6 triliun (Awirya dkk., 2014).

Nilai indeks inklusi keuangan Bali tergolong tinggi, namun masih terdapat masyarakat yang belum dapat mengakses layanan jasa keuangan khususnya lembaga perbankan karena beberapa hambatan seperti hambatan sosial ekonomi, makroekonomi, karakteristik bank, institusi, dan regulasi. Hambatan terhadap

akses layanan jasa keuangan ini disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal mereka (Ummah, 2015). Jasa keuangan formal sulit diakses terutama oleh penduduk desa sehingga mereka memilih untuk meminjam dan menabung di lembaga keuangan informal (Anggraeni, 2009).

Tujuan utama dari inklusikeuangan adalah upaya mengurangi kemiskinan (Sanjaya, 2014 dalam Adriani dan Wiksuana,2018). Pentingnya pengentasan kemiskinan menjadi persoalan utama yang dibahas di seluruh dunia, yang dibuktikan dalam SDGs dengan dinyatakan masalah kemiskinan sebagai poin pertama prioritas. Kemiskinan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Permadi, 2018). Secara umum di Indonesia penduduk miskin didominasi oleh penduduk yang bekerja di bidang pertanian sehingga masyarakat masih merasakan kekurangan akibat hal tersebut (Yusuf dan Sumner, 2015). Badan Pusat Statistik (2019) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan menjadi suatu penyakit yang harus segera diatasi oleh setiap daerah termasuk di Provinsi Bali mengingat kemiskinan digunakan sebagai indicator utama keberhasilan pembangunan baik daerah maupun nasional. Orang miskin yang terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak berujung pangkal yang disebut dengan lingkaran setan (*vicious circle*) (Seran, 2017). Hal tersebut dijelaskan dalam teori lingkaran kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 hingga tahun

2018, rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali disandang oleh Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 6,48 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Klungkung sebesar 6,17 persen dan Kabupaten Buleleng sebesar 5,63 persen. Tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan kerja (Purba dan Aswitari, 2016). Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Teori lingkaran setan menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu sebab kemiskinan (Cahya Ninggrum dan Natha, 2017). Penyebab terjadinya kemiskinan adalah masyarakat yang memang dalam kondisi miskin, yaitu miskin sumber daya, miskin produktivitas, miskin pendapatan, miskin tabungan dan miskin investasi (Adriani dan Wiksuana, 2018).

Rata-rata persentase penduduk miskin terendah disandang oleh Kabupaten Badung sebesar 2,03 persen yang kemudian diikuti oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 2,22 persen, Kabupaten Gianyar sebesar 4,36 persen, dan Kabupaten Tabanan sebesar 4,79 persen. Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita) merupakan tulang punggung perekonomian di Provinsi Bali. Wilayah Sarbagita merupakan wilayah dengan tiga sektor yaitu pariwisata, pertanian dan industri pendukung pariwisata yang dimana sektor-sektor tersebut menjadi sektor utama dalam pusat perkembangan nasional di Indonesia. Sesuai dengan penjelasan tersebut wilayah Sarbagita dapat digunakan sebagai refleksi perkembangan perekonomian di kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali (Bagiada dan Marhaeni, 2018). Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjiwa budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana.

Kemiskinan sebagai permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia seringkali dikaitkan dengan isu ketimpangan pendapatan (Sugiyarto dkk., 2015). Ketimpangan pendapatan dapat terjadi antar individu, sektor maupun daerah (Pradnyadewi dan Purbhadarmaja, 2017). Kemiskinan dan disparitas ekonomi

antarkelompok masyarakat dapat terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sistem keuangan yang ada (Adriani dan Wiksuana,2018). Kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, dan ketiadaan peluang investasi fisik maupun moneter. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menyebabkan pertumbuhan per kapita lebih kecil dan distribusi pendapatan tidak merata (Todaro dan Smith, 2006:264). Menurut Todaro dan Smith (2006:248) pada tingkat pendapatan rata-rata berapapun, ketimpangan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit yang lain.

Ketimpangan antar daerah telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat hingga saat ini (Irawan, 2015). Menurut Barber (2008) hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan hubungan yang saling terkait, yaitu bahwa ketimpangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau ketimpangan adalah bentuk dari kemiskinan. Pada tulisan Rodriguez-Pose dan Hardy (2015) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan dengan ketimpangan. Hal tersebut juga searah dengan statistik yang menunjukkan bahwa memburuknya ketimpangan sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kemiskinan (Ganie-Rochman, 2013). Miranti (2010) mengatakan bahwa, jika distribusi pendapatan menjadi setara atau merata maka hal tersebut dapat mengurangi kemiskinan, begitu juga sebaliknya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Andiny dan Mandasari (2017) menyatakan bahwa variabel kemiskinan tidak mempengaruhi variabel ketimpangan di Provinsi Aceh. Hal ini sama seperti penelitian Sudarlan (2015) yang menjelaskan bahwa kemiskinan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan, hal ini berarti bahwa meningkatnya atau menurunnya jumlah penduduk miskin tidak akan mempengaruhi tingkat ketimpangan.

Pernyataan yang mendukung terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan adalah menurut Presiden Kelompok Bank Dunia, Jim Yong Kim

menyatakan bahwa akses terhadap layanan keuangan dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan (Pasopati, 2015). Penyediaan akses layanan keuangan memiliki potensi untuk mengangkat masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Inklusi keuangan akan menciptakan budaya menabung, penghematan, dan memungkinkan untuk terciptanya mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Allen et al. (2016) menemukan bahwa dengan adanya bank komersial dapat membantu meningkatkan akses keuangan masyarakat miskin di Kenya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Habibullah (2019) menyatakan bahwa inklusi keuangan pada masyarakat miskin adalah inklusivitas keuangan semu dan tidak berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dengan indikator penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan penurunan angka kemiskinan semu, karena dipenuhi dengan bantuan sosial non tunai bukan karena peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Penyediaan akses terhadap layanan keuangan merupakan hal penting yang perlu dilakukan karena hal tersebut berdampak pada perubahan pola konsumsi, investasi, pendidikan, dan menciptakan pendapatan bagi masyarakat miskin sehingga mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan serta menciptakan pertumbuhan inklusif (Dixit dan Ghosh, 2013). Honohan (2008) menyatakan bahwa indeks akses keuangan mempengaruhi secara signifikan untuk menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015) menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki hubungan searah dengan pemerataan pendapatan di Indonesia. Beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi juga memiliki koefisien gini yang besar pula artinya meskipun jangkauan perbankan cukup luas namun distribusi pendapatan tidak merata dengan kesenjangan yang cukup besar. Jakarta, Bali, Papua, dan Papua Barat dan beberapa provinsi lainnya merupakan provinsi yang memiliki nilai indeks inklusi keuangan dan koefisien gini di atas rata-rata artinya di provinsi tersebut akses dan kegunaan jasa perbankan cukup tinggi namun kesenjangan pendapatan juga relatif besar. Berdasarkan research

gap dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai variabel inklusi keuangan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat maka dilakukan analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah ; (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali ; (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali ; (4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tidak langsung inklusi keuangan melalui tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan rumusan masalah bersifat assosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai indeks inklusi keuangan Provinsi Bali telah meningkat pesat dan bahkan melampaui nilai indeks inklusi keuangan rata-rata nasional namun peningkatan nilai indeks inklusi keuangan tersebut tidak sejalan dengan indikator pembangunan seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal itulah yang menjadi alasan pemilihan lokasi dalam penelitian ini. Peneliti ingin menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Objek penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga variabel utama yaitu inklusi keuangan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 dengan lokasi penelitian di 9 kabupaten kota di Provinsi Bali sehingga metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode observasi

non-partisipan dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2018:146).

Indeks inklusi keuangan merupakan ukuran untuk tingkat inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan ini digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Indeks inklusi keuangan ini mencakup tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan kegunaan jasa perbankan.

Tabel 1 Dimensi Inklusi Keuangan

Dimensi	Penetrasi Perbankan	Ketersediaan	Kegunaan
Indikator	Jumlah rekening dana pihak ketiga (rekening simpanan) di bank per 1000 penduduk dewasa.	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah tabungan dan kredit terhadap PDRB
Sumber	Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
Satuan	Unit	Unit	Persen
Bobot (w_i)	1	1	1
Nilai Minimum (m_i)	0	0	0

Sumber: *Ummah, 2015.*

Indeks inklusi keuangan dapat dihitung jika masing-masing dimensi telah dihitung nilai indeks dimensi. Indeks dari setiap dimensi (d_i) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}; i=1,2,3 \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- d_i = dimensi ke- i (d_1 = aksesibilitas, d_2 = ketersediaan, d_3 = penggunaan)
- w_i = bobot yang diberikan untuk dimensi ke- i , $0 \leq w_i \leq 1$
- A_i = nilai aktual dimensi ke- i
- M_i = nilai maksimum (batas atas) dimensi ke- i
- m_i = nilai minimum (batas bawah) dimensi ke- i

Semakin tinggi nilai indeks suatu dimensi, semakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut. Untuk menghitung indeks setiap dimensi memerlukan bobot. Bobot ditentukan berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi inklusi keuangan. Dalam penelitian ini, seluruh dimensi diasumsikan memiliki peranan yang sama penting dalam menentukan tingkat inklusi keuangan, sehingga masing-masing dimensi memiliki bobot sebesar 1. Selain menentukan bobot, untuk menghitung indeks setiap dimensi inklusi keuangan memerlukan batas atas dan batas bawah dari setiap indikator. Batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap. Batas bawah atau nilai minimum (mi) setiap dimensi dalam penelitian ini adalah 0, sedangkan untuk menentukan batas atas atau nilai maksimum (Mi) setiap indikator, ditentukan oleh sebaran masing-masing indikator.

Persamaan (1) akan menghasilkan nilai $0 < d_i < 1$. Apabila nilai ketiga dimensi adalah (0,0,0) ini mengindikasikan kondisi *financial inclusion* yang buruk (disebut juga *financial exclusion* yang sempurna) dan nilai (1,1,1) mengindikasikan kondisi terbaik atau kondisi ideal (atau *financial inclusion* yang sempurna). Nilai IFI di setiap kabupaten/kota dihitung menggunakan formula berikut ini:

$$IFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{n}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(1-d_1)^2 + (1-d_2)^2 + (1-d_3)^2}}{\sqrt{n}} \right) \right] \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- d_1, d_2, d_3 = indeks tiap-tiap dimensi
- n = jumlah dimensi

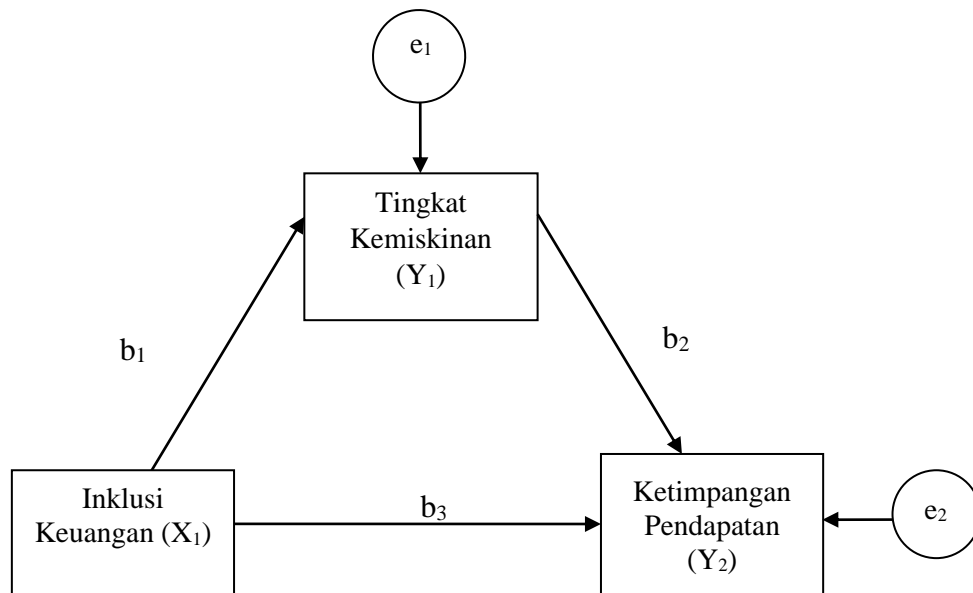
Metode analisis jalur (*Path Analysis*) analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Utama, 2012:159). Tingkat inklusi keuangan dan menurunnya tingkat kemiskinan serta berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat merupakan gambaran hasil kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Park dan Mercado (2015) yang mengaitkan inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan negara-negara berkembang di Asia menyatakan bahwa

inklusi keuangan adalah salah satu strategi untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan dan menjadi alat yang efektif untuk membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih rendah. Rajendran (2013) menyatakan bahwa mencapai inklusi keuangan tidak saja menolong pembangunan, tetapi juga untuk mencapai inklusi sosial. Inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif telah menjadi agenda prioritas dari pemerintah di semua negaraberkembang. Rajendran (2013) kemudian mensintesis sejumlah penelitian yang mengkaji dampak inklusi keuangan terhadap pembangunan yang mencatat adanya dampak positif dari inklusi keuangan terhadap pengurangan kemiskinan.

Tiwari *et al.* (2013) meneliti terkait dampak pembangunan sektor keuangan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan desa-kota di India dengan menggunakan data tahunan dari tahun 1965 sampai 2008. Hasil penelitiannya menunjukkan dalam jangka panjang pembangunan di sektor keuangan dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan desa-kota di India. Analisis terkait dampak pembangunan dan liberalisasi keuangan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di India dilakukan oleh Ang (2010) menggunakan metode *autoregressive distributed lag* (ARDL) dengan tahun dasar analisis 1951-2004. Pertumbuhan GDP per kapita dan pembangunan sektor keuangan, yang dicerminkan dengan perluasan penyebaran perbankan, dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di India.

Beck *et al.* (2007) menganalisis terkait dampak pembangunan sektor keuangan terhadap distribusi pendapatan dan pendapatan masyarakat miskin menggunakan data dari 72 negara tahun 1960-2005. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *generalized-methods-of-moments* (GMM). Penelitian tersebut menemukan bahwa pembangunan sektor keuangan membantu masyarakat miskin. Pembangunan sektor keuangan yang semakin besar mendorong pendapatan orang miskin tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan rata-rata GDP per kapita sehingga ketimpangan distribusi pendapatan semakin rendah. Sebesar 60 persen dari pembangunan sektor keuangan berdampak pada

pertumbuhan agregat dan 40 persen terhadap pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Ummah (2015) keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat mendorong pendapatan masyarakat miskin semakin meningkat sehingga kesenjangan pendapatan dapat berkurang. Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Kerangka Konseptual Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1X_1 + e_1 \dots\dots\dots(3)$$

$$Y_2 = b_2Y_1 + b_3X_1 + e_2 \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan :

Y_1	= tingkat kemiskinan
Y_2	= ketimpangan pendapatan masyarakat
X_1	= inklusi keuangan
b_1, b_2, b_3	= koefisien regresi
e_1, e_2	= variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Indikator penetrasi perbankan

Sistem keuangan dapat dikatakan inklusif apabila memiliki pengguna sebanyak mungkin. Sistem keuangan harus dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Indikator penetrasi perbankan merupakan salah satu instrumen untuk mengukur hal tersebut dengan menggunakan jumlah rekening dana pihak ketiga per 1000 populasi dewasa yang ada pada masing-masing kabupaten/kota. Dimana dalam hal ini populasi dewasa diartikan adalah penduduk usia kerja ≥ 15 tahun, hal tersebut mengikuti pengertian populasi dewasa dalam perhitungan indeks inklusi keuangan oleh Bank Dunia.

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2018, rasio jumlah rekening dana pihak ketiga atau rekening simpanan (giro, tabungan dan deposito) per 1.000 penduduk dewasa di Provinsi Bali sebesar 1.761, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 1.617. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan jumlah rekening simpanan yang dimiliki penduduk dewasa di bank sepanjang tahun 2018. Nilai rasio lebih dari 1.000 menandakan keberadaan penduduk dewasa yang memiliki lebih dari satu rekening simpanan. Selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2018, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan rasio jumlah rekening dana pihak ketiga. Secara rata-rata selama tahun 2014 hingga 2018 Kota Denpasar memiliki tingkat penetrasi perbankan tertinggi, dimana penduduk Kota Denpasar masing-masing memiliki 3 rekening simpanan disusul kemudian dengan Kabupaten Badung yang secara rata-rata penduduknya masing-masing mempunyai 1 rekening simpanan. Hanya saja, rasio tinggi di dua daerah tersebut sangat timpang jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali, dimana Kabupaten Karangasem, dan

Bangli yang rasionya secara rata-rata selama tahun 2014 hingga 2018 belum mencapai 0,7 rekening simpanan, serta di Kabupaten Tabanan, Jembrana, Gianyar, Klungkung dan Buleleng yang juga rasio rekening simpanannya masih di bawah 1 rekening. Artinya, secara umum 7 dari 9 kabupaten di Pulau Dewata belum mencapai rasio ideal 1 rekening simpanan per penduduk dewasa. Perlu kerja sama lebih intens dengan perbankan dan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di 7 kabupaten tersebut agar penduduk di daerah terpencil juga dapat menikmati kesempatan menjadi masyarakat *bankable* dan akhirnya pembangunan di daerah ini merata.

b) Indikator ketersediaan perbankan

Indikator ketersediaan merupakan indikator lain untuk mengukur sistem keuangan yang inklusif. Indikator ini menunjukkan tingkat kemampuan industri perbankan untuk menjangkau jumlah penduduk yang ada di sekitarnya. Indikator ini diukur dengan jumlah kantor bank per 100.000 populasi dewasa yang ada pada masing-masing kabupaten/kota. Jika dilihat pada Gambar 3 dari tahun 2014 hingga 2018 secara rata-rata indikator ketersediaan yang paling baik dimiliki oleh Kabupaten Badung kemudian disusul oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Kabupaten Badung memiliki rata-rata rasio jumlah kantor bank sebanyak 258 kantor per 100.000 penduduk dewasa. Hal ini sesuai dengan keadaan di lapangan mengingat Kabupaten Badung adalah kabupaten yang menjadi pusat-pusat wisata yang melibatkan tidak hanya warga lokal Bali, namun juga warga lokal luar Bali dari bahkan mancanegara. Untuk dapat mengaktifkan perekonomian melalui pariwisata, fasilitas lembaga keuangan perlu didorong untuk dapat mempermudah transaksi yang bisa melibatkan kurs dari berbagai macam negara. Hal inilah kemudian yang menyebabkan Kabupaten Badung wajar memiliki nilai yang baik dalam indikator ketersediaan.

Berbeda dengan daerah yang memiliki indikator ketersediaan yang tinggi tersebut, secara rata-rata dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng termasuk kedalam daerah yang memiliki indeks ketersediaan yang rendah. Sektor yang berperan penting dalam

menggerakkan roda perekonomian di daerah-daerah tersebut masih sederhana karena bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan peternakan dimana transaksi ekonomi yang dilakukan dari aktivitas tersebut juga didominasi oleh transaksi yang tidak mengharuskan masyarakat menggunakan layanan perbankan, sehingga hal itu dapat menyebabkan kebutuhan akan layanan lembaga keuangan menjadi sesuatu yang bukan menjadi prioritas utama. Faktor yang membuat indeks ketersediaan kecil di daerah tersebut juga dikarenakan masyarakatnya yang masih tradisional sehingga seringkali merasa pergi ke Bank adalah aktivitas yang mewah sehingga muncul perasaan enggan untuk ke bank, jika permintaan akan produk-produk perbankan sedikit maka penawarannya pun akan sedikit, sehingga tidak heran jika daerah-daerah seperti ini masih memiliki indikator ketersediaan yang rendah.

c) Indikator kegunaan

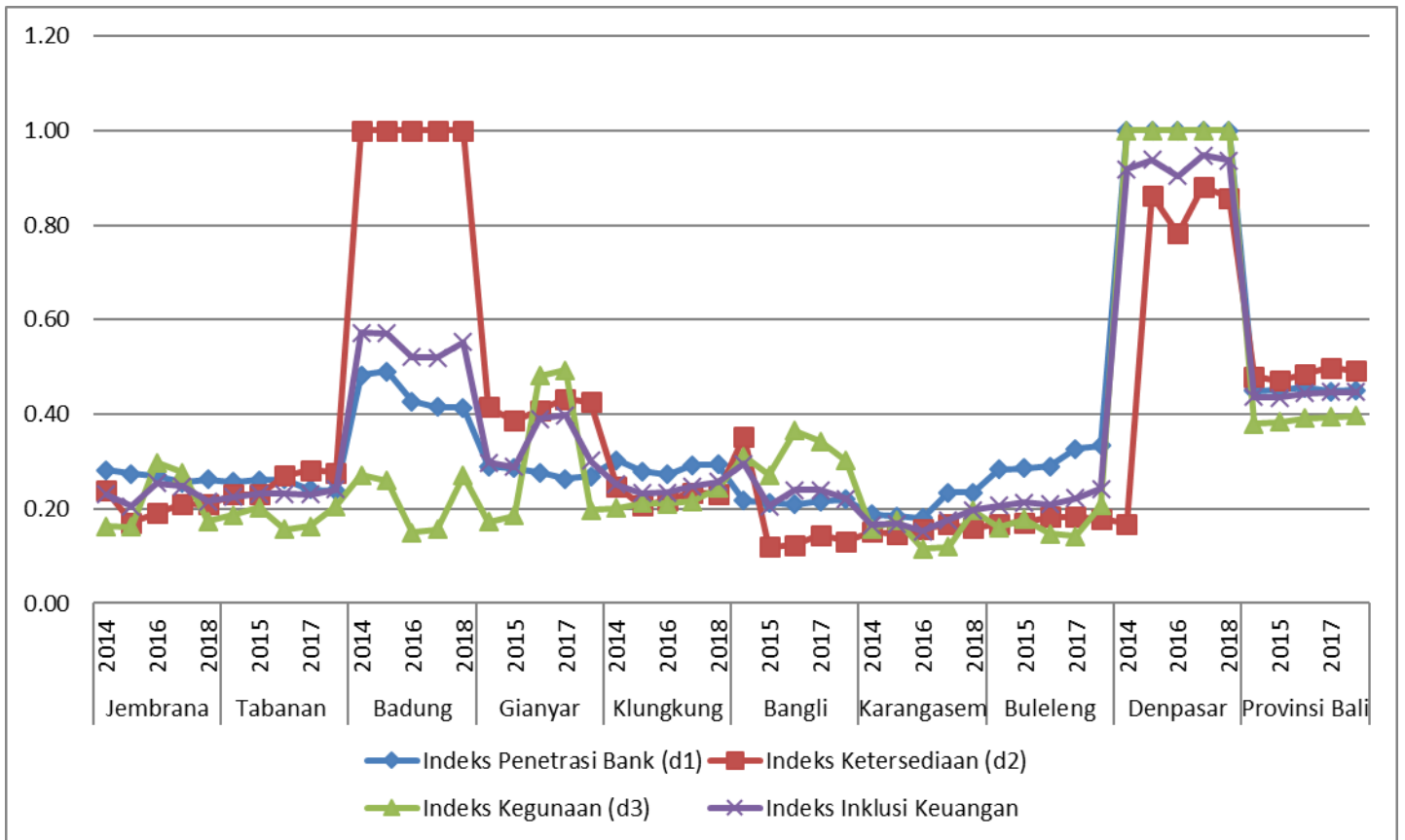
Indikator *usage* (kegunaan rekening) ini diartikan sebagai fungsi dari kepemilikan rekening yang digunakan untuk bertransaksi dalam sistem keuangan. Hal ini didasari oleh faktor jumlah kepemilikan rekening masih belum dapat merepresentasikan penggunaan produk-produk perbankan karena sedikitnya aktivitas perbankan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Alat ukur yang digunakan untuk melihat tingkat indikator ini adalah melalui jumlah tabungan dan dana kredit terhadap PDRB pada masing-masing kota/kabupaten.

Perhitungan indeks kegunaan sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 3, nilai indeks kegunaan tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar. Salah satu hal yang mempengaruhi tingginya nilai ini di Kota Denpasar adalah karena Kota Denpasar merupakan ibukota provinsi yang mana juga menjadi pusat perekonomian Provinsi Bali. Ketika suatu daerah menjadi pusat perekonomian, maka aktivitas ekonomi akan menjadi sangat terdiferensiasi sehingga bisa memunculkan jumlah tabungan dan jumlah pinjaman yang tinggi. Jumlah tabungan dan jumlah pinjaman juga sedikit banyak juga dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan.

d) Indeks Inklusi Keuangan

Dalam penelitian ini, indeks inklusi keuangan dibagi kedalam tiga kategori berdasarkan nilai indeks inklusi keuangannya. Pembagian ke dalam tiga kategori ini mengadaptasi penelitian Ummah (2015). Pertama, suatu kabupaten/kota dikategorikan sebagai kabupaten/kota dengan inklusi keuangan tinggi adalah kabupaten/kota yang memiliki indeks inklusi keuangan antara 0,6-1, Kabupaten/kota yang memiliki indeks inklusi keuangan antara 0,3-0,6 dikategorikan sebagai kab/kota dengan inklusi keuangan sedang, dan kabupaten/kota yang memiliki indeks inklusi keuangan dibawah 0,3 dikategorikan sebagai kabupaten/kota dengan inklusi keuangan rendah.

Secara rata-rata dari tahun 2014 hingga 2018 tingkat inklusi keuangan di Provinsi Bali masuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 0,44. Hal ini menunjukkan sudah cukup banyak penduduk yang dapat mengakses perbankan. Namun, jika dilihat tingkat inklusi keuangan di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Bali terlihat adanya gap atau ketimpangan yang sangat besar, dimana secara rata-rata dari tahun 2014 hingga 2018 hanya Kota Denpasar saja yang memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi yaitu sebesar 0,93. Kabupaten Badung dan Gianyar secara rata-rata dari tahun 2014 hingga 2018 memiliki indeks inklusi keuangan dalam kategori sedang, yaitu sebesar 0,55 dan 0,34, sementara itu 6 Kabupaten lainnya di Provinsi Bali masuk dalam kategori indeks inklusi keuangan yang rendah. Masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan disebabkan oleh banyak faktor yaitu adanya hambatan salah satunya geografis dimana setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda hal ini mempengaruhi dalam hal pendirian kantor cabang perbankan yang cenderung menyebabkan biaya yang mahal. Selain itu, persyaratan yang ketat, proses yang kompleks, dan formalitas yang tinggi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses perbankan (Bank Indonesia, 2014).



Sumber: *Data sekunder diolah, 2019*

Gambar 3 Indeks Penetrasi Perbankan, Indeks Ketersediaan, Indeks Kegunaan dan Indeks Inklusi Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali selama kurun waktu 2014-2018

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. Berdasarkan hasil olahan data dua set regresi dapat diringkas menjadi:

Tabel 2 Ringkasan Koefisien Jalur Dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	t hitung	Sig	Keterangan
$X_1 \longrightarrow Y_1$	-0,849	0, 539	-11,136	0,000	Signifikan
$X_1 \longrightarrow Y_2$	0,544	0,038	2,062	0,045	Tidak Signifikan
$Y_1 \longrightarrow Y_2$	0,540	0,005	2,049	0,046	Signifikan

1) Pengaruh Langsung Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa inklusi keuangan (X_1) berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan (Y_1), dengan probabilitas kurang dari 5 persen, dimana hasil pengujian inklusi keuangan (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y_1) yang memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (nilai alpha). Koefisien regresi inklusi keuangan sebesar $-0,849$ mempunyai arti apabila setiap kenaikan 1 nilai indeks inklusi keuangan menyebabkan penurunan sebesar 0,849 persen pada tingkat kemiskinan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Penyediaan akses layanan keuangan memiliki potensi untuk mengangkat masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Inklusi keuangan akan menciptakan budaya menabung, penghematan, dan memungkinkan untuk terciptanya mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya. Penyediaan akses terhadap layanan keuangan merupakan hal penting yang perlu dilakukan karena hal tersebut berdampak pada perubahan pola konsumsi, investasi, pendidikan, serta menciptakan pertumbuhan inklusif (Dixit dan Ghosh, 2013). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Allen *et al.* (2016) menemukan bahwa dengan adanya bank komersial dapat membantu meningkatkan akses keuangan masyarakat miskin di Kenya. Rajendran (2013) mensintesis sejumlah penelitian yang mengkaji dampak inklusi keuangan terhadap pembangunan yang mencatat adanya dampak positif dari inklusi keuangan terhadap pengurangan kemiskinan.

Pendekatan efektif untuk inklusi keuangan di Filipina terjadi karena adanya lingkungan kebijakan yang baik dan dukungan dari pasar yang kuat. Studi yang dilakukan oleh Fujimoto dan Rillo (2014:111) mengungkapkan Filipina sebagai negara yang mempelopori *mobile banking* telah mengimplementasikan inovasi teknologi dengan didukung oleh model bisnis dan kebijakan pemerintah yang baik. Inovasi teknologi tersebut akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan keuangan murah dan efisien untuk masyarakat miskin. Kajian lain dilakukan oleh Terada dan Vanderberg (2014:89) menunjukkan bahwa pendekatan inklusi keuangan di Thailand dilakukan oleh pemerintah. Program pemerintah tersebut dinamakan Dana Desa (*Village Fund*) yang menjadi salah

satu institusi keuangan mikro paling besar di seluruh dunia yang menyediakan kredit untuk rumah tangga petani dan perusahaan kecil di pedesaan. Program ini kemudian menjadi model untuk beberapa negara untuk mengembangkan program keuangan mikro.

2) Pengaruh Langsung Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan (Y_1) berpengaruh nyata terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dengan probabilitas kurang dari 5 persen, dimana hasil pengujian variabel tingkat kemiskinan (Y_1) terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat (Y_2) yang memiliki nilai signifikansi $0,046/2$ yaitu $0,023 < 0,05$ (nilai alpha). Koefisien regresi tingkat kemiskinan sebesar $0,540$ mempunyai arti apabila setiap kenaikan 1 persen tingkat kemiskinan menyebabkan peningkatan sebesar $0,540$ rasio gini pada ketimpangan pendapatan masyarakat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Menurut Barber (2008) hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan hubungan yang saling terkait, yaitu bahwa ketimpangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau ketimpangan adalah bentuk dari kemiskinan. Pada tulisan Rodriguez-Pose dan Hardy (2015) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan dengan ketimpangan. Hal tersebut juga searah dengan statistik yang menunjukkan bahwa memburuknya ketimpangan sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kemiskinan (Ganie-Rochman, 2013). Miranti (2010) mengatakan bahwa, jika distribusi pendapatan menjadi setara atau merata maka hal tersebut dapat mengurangi kemiskinan, begitu juga sebaliknya.

3) Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Persamaan regresi diatas juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali karena perbedaan arah antara hipotesis penelitian

dengan hasil olahan data SPSS, dimana pada hipotesis penelitian disebutkan inklusi keuangan (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat (Y_2) sedangkan pada hasil olahan data SPSS menunjukkan bahwa inklusi keuangan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Inklusi keuangan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali disebabkan karena perkembangan industri perbankan di Provinsi Bali masih belum merata dan terkonsentrasi di Bali Selatan. Persebaran ketersediaan layanan perbankan di Provinsi Bali masih didominasi oleh kuatnya peranan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dilihat dari indikator penetrasi perbankan, secara rata-rata selama tahun 2014 hingga 2018 Kota Denpasar memiliki tingkat penetrasi perbankan tertinggi, dimana penduduk Kota Denpasar masing-masing memiliki 3 rekening simpanan disusul kemudian dengan Kabupaten Badung yang secara rata-rata penduduknya masing-masing mempunyai 1 rekening simpanan. Hanya saja, rasio tinggi di dua daerah tersebut sangat timpang jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali, dimana Kabupaten Karangasem, dan Bangli yang rasionya secara rata-rata selama tahun 2014 hingga 2018 belum mencapai 0,7 rekening simpanan, serta di Kabupaten Tabanan, Jembrana, Gianyar, Klungkung dan Buleleng yang juga rasio rekening simpanannya masih di bawah 1 rekening. Artinya, secara umum 7 dari 9 kabupaten di Pulau Dewata belum mencapai rasio ideal 1 rekening simpanan per penduduk dewasa.

Dilihat secara rata-rata indikator ketersediaan yang paling baik dimiliki oleh Kabupaten Badung kemudian disusul oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Kabupaten Badung memiliki rata-rata rasio jumlah kantor bank sebanyak 258 kantor per 100.000 penduduk dewasa. Berbeda dengan daerah yang memiliki indikator ketersediaan yang tinggi tersebut, secara rata-rata dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng termasuk kedalam daerah yang memiliki indeks ketersediaan yang rendah. Perhitungan indeks kegunaan

menunjukkan nilai indeks kegunaan tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar. Salah satu hal yang mempengaruhi tingginya nilai ini di Kota Denpasar adalah karena Kota Denpasar merupakan ibukota provinsi yang mana juga menjadi pusat perekonomian Provinsi Bali. Ketika suatu daerah menjadi pusat perekonomian, maka aktivitas ekonomi akan menjadi sangat terdiferensiasi sehingga bisa memunculkan jumlah tabungan dan jumlah pinjaman yang tinggi. Jumlah tabungan dan jumlah pinjaman juga sedikit banyak juga dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan.

4) Pengaruh Tidak langsung Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Melalui Tingkat Kemiskinan

Hasil uji sobel menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan merupakan variabel yang memediasi pengaruh variabel inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil uji sobel juga menunjukkan bahwa dalam penelitian ini merupakan mediasi penuh. Mediasi penuh artinya variabel independen tidak mampu mempengaruhi secara signifikan variabel variabel dependen tanpa melalui variabel mediator, dimana inklusi keuangan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Beck *et al.* (2007) menganalisis terkait dampak pembangunan sektor keuangan terhadap distribusi pendapatan dan pendapatan masyarakat miskin menggunakan data dari 72 negara tahun 1960-2005. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *generalized-methods-of-moments* (GMM). Penelitian tersebut menemukan bahwa pembangunan sektor keuangan membantu masyarakat miskin. Pembangunan sektor keuangan yang semakin besar mendorong pendapatan orang miskin tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan rata-rata GDP per kapita sehingga ketimpangan distribusi pendapatan semakin rendah. Menurut Ummah (2015) keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan

keuangan. Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat mendorong pendapatan masyarakat miskin semakin meningkat sehingga kesenjangan pendapatan dapat berkurang.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal yaitu, implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa secara teoritis, penelitian ini secara keseluruhan mendukung beberapa teori yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris tentang hubungan antara variabel inklusi keuangan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Implikasi praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian, bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan pihak lain yang berkepentingan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Pada dasarnya, ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali terdiri dari inklusi keuangan, dan tingkat kemiskinan. Inklusi keuangan di Provinsi Bali memang cukup besar namun perkembangan akses layanan jasa keuangan di Provinsi Bali masih belum merata dan terkonsentrasi di Bali Selatan. Persebaran akses layanan jasa keuangan di Provinsi Bali masih didominasi oleh kuatnya peranan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Hal itu sejalan dengan kedua daerah itu merupakan destinasi kunjungan wisatawan mancanegara sehingga tidak mengherankan daerah itu menjadi pusat perekonomian di pusat pemerintahan di Bali. Perkembangan tersebut turut berdampak pada ketidakseimbangan jasa pelayanan keuangan inklusif yang dilakukan perbankan di Bali.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil ini berarti bahwa semakin tinggi indeks inklusi keuangan maka akan menyebabkan penurunan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 2) Tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan maka akan mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 3) Inklusi keuangan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, yang diperoleh menolak hipotesis diawal, dimana pada hipotesis disebutkan variabel inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali disebabkan karena perkembangan industri perbankan di Provinsi Bali masih belum merata dan terkonsentrasi di Bali Selatan khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
- 4) Tingkat kemiskinan memediasi secara negatif dan signifikan hubungan inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa dalam penelitian ini merupakan mediasi penuh.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang dipaparkan kepada perusahaan dan penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Baik pemerintah maupun pelaku sektor perbankan bekerja sama untuk meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan yaitu dengan meningkatkan setiap dimensi inklusi keuangan. Penetrasi perbankan dapat ditingkatkan dengan mengajak masyarakat untuk menabung. Akses perbankan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan infrastruktur fisik perbankan secara merata di masing-masing daerah di Provinsi Bali seperti penambahan jumlah kantor bank, pengadaan ATM dan mesin setor tunai. Salah satu pilar dari kebijakan Bank Indonesia terkait Strategi Nasional Inklusi Keuangan adalah fasilitas distribusi/intermediasi. *Mobile banking* dapat menjadi intermediasi antara penyedia jasa keuangan dengan penduduk Indonesia di berbagai daerah sedangkan untuk dimensi kegunaan, pemerintah dan perbankan dapat menyediakan kredit murah dan mudah diakses oleh pengusaha kecil yang membutuhkan modal.

REFERENSI

- Adriani, D., & Wiksuana, I.G.B. (2018). Inklusi Keuangan dalam Hubungannya dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali, *E Jurnal Manajemen UNUD*, 7(12), 6420-6444.
- Allen F., Demirguc-Kunt A., Klapper L., & Peria M.S.M. (2016). The Foundations of *Financial inclusion*: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts. Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team. World Bank : *Working paper No 6290*.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *JENSI (Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi)*, 1(2), 196-210.
- Anggraeni L. 2009. Factor Influencing and Credit Constraints of a Financial Self-Help Group in a Remote Rural Area: The Case of ROSCA and ASCRA in Kemang Village West Java. *Journal of Applied Sciences*, 9(11):2067-2077.
- Artana Yasa, I.K.O., & Arka, S. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 63-71.

- Astrini A., N.M.M, & Purbadharmaja, I.B.P. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP UNUD*, 2(8), 384-392.
- Awirya, A. A., Nugraha, D.A., & Haloho, E.M. (2014). Strategi Pengembangan Perluasan Akses Lembaga Keuangan: Studi Kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 15 No. 1 Juli 2014: 57-70.
- Bagiada, M., & Marhaeni, A.A.I.N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Penduduk Miskin Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7 (3) : 560-591.
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Financial inclusion*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Barber, C. (2008). *Notes on poverty and inequality*. Inggris: Oxford.
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Financial inclusion*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beck, T., Demirguc-Kunt A., & Levine, R. (2007). Finance, Inequality and the Poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27-49.
- Beck T., Demirguc-Kunt A., & Peria M.S.M. (2006). Reaching Out: Access to and Use of Banking Services Across Country. *Journal of Financial Economics*, 85, 234-266.
- Cahaya Ninggrum, N.K.K.D., & Natha, I.K.S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal EP Unud*, 6(4): 597-621.
- CNBC Indonesia. (2018). *Anomali Inklusi Keuangan dan Bunga Tinggi 'Rentenir' Fintech*. Diunduh dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20180309114645-14-6728/anomali-inklusi-keuangan-dan-bunga-tinggi-rentenir-fintech>.
- Dixit, R., & Ghosh, M. (2013). *Financial inclusion for Inclusive Growth of India – A Study of Indian States*. *International Journal of Business Management & Research (IJBMR)*, 3(1), 147-156.
- Fujimoto, A. & Rillo, A.D. (2014). *From Microfinance to Mobile Banking: Making Financial Inclusion Work in the Philippines*. Jepang: Asian Development Bank Institute.
- Habibullah, H. (2019). Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. *Sosio Informa*, 5(1).
- Hartati, I., & Azwar. (2017). *Seberapa Penting Inklusi Keuangan Syariah Bagi Indonesia?*.

- Honohan, P. (2008). Cross-country variation in household access to financial services. *Journal of Banking & Finance*, 32(11), 2493–2500.
- Irawan, A. (2015). Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1),148-149.
- Kristianto, F. (2016). *Tingkat Literasi Orang Bali Berbanding Terbalik dengan Inklusi Keuangan*. Diunduh dari bisnis.com website: <https://finansial.bisnis.com/read/20161012/55/591614/tingkat-literasi-orang-bali-berbanding-terbalik-dengan-inklusi-keuangan>
- Kristianto, F. (2018). *Serapan Kredit di Bali Timpang, Terkonsentrasi di Tiga Daerah*. Diunduh dari bisnis.com website: <https://bali.bisnis.com/read/20180904/538/834874/serapan-kredit-di-bali-timpang-terkonsentrasi-di-tiga-daerah>
- Miranti, R. (2010). Poverty in Indonesia 1984-2002:The Impact of Growth and Changes in Inequality. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46 (1),79-97
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016. *Booklet*.
- Park, C.Y., & Mercado Jr, R.V.(2015). Financial inclusion, Poverty, And Income Inequality in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series No 426*.
- Pasopati, G. (2015). *Bank Dunia: 2 Miliar Orang Tidak Memiliki Rekening Bank*. Diunduh dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150417121926-78-47389/bank-dunia-2-miliar-orang-tidak-memiliki-rekening-bank?>.
- Permadi, Y.A.(2018). Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 216-233.
- Purba, Y.S.T. & Aswitari, L.P. (2016). Pengaruh Peran Sektor Non-Pertanian, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal EP UNUD*, 5(7), 799-824.
- Pradnyadewi T, D., &Purbadharmaja, I.B.P. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali.*E-Jurnal EP UNUD*, 6(2), 255-285.
- Rajendran, K. (2013). *Financial inclusion, Financial Exclusion and Inclusive Growth*. *SSRN Electronic Journal*, April.

- Rimbawan, N.D. (2014). Bali Diproyeksikan Mengalami Bonus Demografi Puncak 2020-2030 Peluang atau Bencana?. *PIRAMIDA*, 10(1), 37 – 44.
- Rodriguez-Pose, A., & Hardy, D. (2015). Addressing Poverty and Inequality in the Rural Economy from a Global Perspective. *Applied Geography*, 61, 1-13.
- Rusdianasari, F.(2018). Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 244-253.
- Sanjaya, I.M. (2014). Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Tesis. Institut Pertanian Bogor.
- Seran, S. (2017). Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1).
- Sri Budhi, M.K. (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 1-6.
- Sudarlan. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Eksis*, 11(1), 3036–3213.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyarto, Mulyo, J.H. & Seleky, R.N. (2015). Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Agro Ekonomi*, 26(2), 115-120.
- Stapleton, T. (2013). Unlocking the transformative potential of branchless banking in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(3), 355-380.
- Terada, Y. & Vandenberg, P. (2014). *Thailand's State-Led Approach to Financial Inclusion*. Jepang: Asian Development Bank Institute.
- Tiwari A.K., Shahbaz, M., & Islam, F.(2013). Does Financial Development Increase Rural-Urban Income Inequality? Cointegration Analysis In The Case Of India. *Journal of Social Economics*, 40(2), 151-168.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.

Ummah, B.B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L.(2015). Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 1-27.

Utama, S.M. (2012). *Aplikasi Analisis Kuantitatif* (Edisi Keenam). Denpasar: CV. Sastra Utama.

Windia, W. (2015). Sekali Lagi Tentang Pengentasan Kemiskinan Di Bali. *PIRAMIDA*, 9(1), 1-7.

World Bank. (2009). *Measuring Access to Financial Services Around The World*. Washington DC (US): The World Bank Group.

Yusuf, A.A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323–348.